

Menpora Andi Siap Dipecat

- Seskab Dipo Minta 2 Menteri Diam
- KPK Geledah Rumah Orang Anas

JAKARTA, TRIBUN - Menpora Andi Mallarangeng menyatakan siap dipecat presiden, menyusul rilis hasil audit investigasi BPK yang mengantarnya dalam pusaran penyimpanan megaprojek Hambalang Rp 2,5 triliun.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap keterlibatan Menpora Andi dalam skandal proyek Hambalang yang diidentifikasi merugikan negara sekitar Rp 243 miliar. Keterlibatan Andi terkait proses pemilihan rekanan.

Audit BPK menyatakan, Andi tidak mengetahui kewenangannya sebagai menteri dalam penetapan pemenang lelang dan pengusulan persetujuan kontrak *multiyears* (tahun



TRIBUN/DOK

” Sikap Istana sama saat audit Bank Century dulu. Dipo dkk tinggal dua tahun di Istana. Kelak mereka tak bisa berkilah. ”

BAMBANG SOESATYO

Anggota Komisi Hukum DPR

jamak) dan hanya berharap pemberitahuan dari staf.

Selain itu, Andi dianggap mengendalikan pelaksanaan kegiatan di instansinya dengan tidak mematuhi ketentuan perundangan mengenai pengendalian intern, terutama dalam otorisasi dan dokumentasi transaksi dan kejadian penting. Apabila sebelumnya Andi

senantiasa berkilah tak tahumenuhu, usai rilis audit BPK sontak menyatakan kesiapannya, apabila Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memecatnya akibat kasus Hambalang.

”Bagi saya jabatan adalah pengabdian, *nggak* bisa selamanya, hanya sementara.

■ Bersambung ke Hal 7

Menpora Andi Siap Dipecat

Kapan saja presiden mau mem-berhentikan (saya) bisa dilaku-kan. Saya harus siap," tegas Menpora Andi Mallarangeng di Gedung Kemempora Jakarta, Kamis (1/11).

Menurut Andi, jabatannya sebagai Menpora karena di-angkat dan diberhentikan pre-siden. Ia menegakkan siap di-berhentikan, dan siap mem-bantu pihak terkait menye-lesaikan skandal yang diduga sarat korupsi itu.

"Saya sebagai menteri, ka-rena itu punya tanggungjawab moral tentang apa yang terjadi di Kementerian saya. Kare-nanya saya di Kemempora, siap bekerja penuh dalam pengusutan kasus ini. Supaya jelas du-duk perkaranya. Siapa yang salah dan benar, harus ber-tanggungjawab," tandasnya.

Ia berharap BPK dan KPK sesegera mungkin menyelesaikan tugasnya, termasuk dalam audit maupun pengusutan pi-hak-pihak yang diduga terlibat. "Sekali lagi kami selalu beker-jasama penuh dengan BPK dan KPK. Ini masih audit saya tahu. Harapan saya segera mungkin di-usut, supaya jelas semua-nya," jelasnya.

"Saya sebagai menteri telah berusaha sebaik-baiknya dalam menjalankan tugas, tapi kalau ada 'staf saya ada penyimp-angan silakan usut,'" katanya, menilai diri sendiri.

Andi Mallarangeng tak lupa mengutip pernyataan khasnya. "Saya baca-komentar (banyak pihak) yang mengatakan, ma-sak menteri *nggak* tahu. Men-teri tahu tentang proyek dan programnya, tentang penyimp-angannya tidak," tandasnya.

Kontradiktif
Kendati begitu ia meng-hormati, terutama langkah BPK dan KPK. Ia berharap dari audit laporan BPK bisa me-nunjukkan siapa yang bersalah dan tidak. "Kami menghargai apapun hasilnya, dan yang sedang dilakukan KPK supaya segera tuntas," tuturnya.

Andi mengakui belum membaca LHP audit BPK yang diterima sekitar pukul 18.00 WIB kemarin, sehingga belum bisa memberi penjelasan sub-stansi materi LHP. "Hasil au-dit BPK baru kami terima lima menit lalu (kemarin petang)," ujarnya.

Mencermati pernyataan An-di yang menyatakan tak tahu menahu penyimpangan, Ketua BPK Hadi Permomo geleng-geleng kepala. Andi tetap berke-lit atas dalih tak mengetahui lelang proyek Hambalang dengan nilai di atas Rp 50 miliar, sebagaimana ketentuan yang ada.

Menurut Hadi, dalam aturan tertulis sudah dijelaskan, kontrak pengadaan barang, dan jasa dengan nilai di atas Rp 50 miliar, harus diketahui menteri atau pimpinan lembaga terkait.

"Hal tersebut, kontradiktif dengan pengakuan Andi. Padahal, penyimpangan pro-yek tersebut berpotensi meru-

gikan keuangan negara sekitar Rp 243 miliar," tegas Hadi.

Lalu, apa tanggapan man-tan Sesmenpora Wafid Muha-ram yang turut terseret skan-dal Hambalang. Audit investi-gati BPK menyebutkan Wafid selaku Sesmenpora tanpa kua-sa dari Menpora mengajukan permohonan anggaran tahun jamak dan menetapkan pemang lelang konstruksi dengan nilai di atas Rp 50 miliar.

"Jangan dulu, *ya*. Saya mau fokus di sidang Wisma Atlet," kata Wafid sebelum bersaksi untuk terdakwa Angelina Sondakh di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.

Bagaimana dengan peran Menpora Andi? Wafid enggan berkomentar. Alasannya, dapat mengganggu jalannya pe-nyidikan atau penyidikan kasus korupsi Hambalang.

Kendati demikian, Wafid menyarankan meneliti sendiri istilah pembiaran yang dimak-sudkan BPK terhadap Menpo-ra. "Kata pembiaran artinya apa? Itu saja," kata Wafid.

Jika Menpora Andi siap di-pecat, meski tetap membantah terlibat korupsi proyek Hamba-lang, Meneku Martowardojo menjamin langkah yang dilaku-kan kementeriannya terkait pencairan dana proyek Hamba-lang sesuai prosedur. Namun, jika audit BPK menemukan kejanga-lan, ia siap memeriksanya.

"Saya pikir kalau ada 11 temuan dan temuan yang di-kaitkan kementerian keuangan ada prosedur yang tak dipenu-hi, itu nanti prosedurnya apa yang tidak dipenuhi. Kami akan periksa setelah kami terima. Kalaupun saya mengatakan prosedur itu tak dipenuhi, saya yakin di Kemenkeu paling ti-dak, saya sebagai menteri, itu diselesaikan sesuai prosedur," kata Agus.

Ia berjanji segera membahas hasil audit setelah terima laporan audit BPK. "Saya belum lihat laporannya seperti apa dan hasil auditya. Komitmen kita, kita akan jalankan dengan baik. Secara administrasi kita lihat nanti, apa yang tidak dipenuhi oleh prosedur itu," tuturnya.

Jika dalam urusan adminis-trasi ada kelemahan, akan diper-iksa apakah kelemahan itu fatal atau tidak. "Kalau fatal, mesti kita lihat kenapa sampai fatal. Di Kementerian Olahraga dengan atalinya keuangan negara imple-mentasi 17/2003 itu tanggung-jawab kementerian itu tinggi sekali," tegas Menkeu Agus.

Audit Forensik
Dalam audit BPK yang di-sampaikan ke DPR, Kemenkeu dinilai tidak mematuhi prosedur dalam pencairan dana. Selain Menkeu Agus dianggap terlibat, mantan Dirjen Anggaran Kem-enkeu Ani Rahmawati (kini Wamenkeu) dan beberapa pe-jabat Kemenkeu lainnya.

Hingga kemarin, Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengaku belum menerima hasil audit investigatif BPK yang menyeret

dua menteri dari 46 pejabat. "Saya juga yakin Bapak Presiden dan Wapres belum menerima. Setahu saya begitu," kata Dipo.

Ia mengaku tahu adanya 11 indikasi penyimpangan proyek Hambalang dari media massa. Dari 11 indikasi itu, Dipo me-ngaku belum tahu secara jelas penyimpangan proyek Hamba-lang. "Tapi ini belum saya baca secara detail. Biarlah lapon BPK itu diterima DPR, kemudian nanti DPR menindak-lanjutinya," katanya.

Menurut Dipo, penyelesaian cepat kasus korupsi Hamba-lang dinilai baik untuk peme-rintah. "Siapa pun yang ber-tanggungjawab, harus ber-tanggungjawab. Kita tunggu saja," tegasnya.

Seskab Dipo justru minta Menpora Andi dan Menkeu Agus, tak banyak mengomen-tari hasil audit investigatif BPK. "Saya harapkan supaya ke-duanya *colling down*, tidak berkomentar. Jadi saya kira *cool-ing down* dulu lebih penting," ujarnya.

Dipo mengaku juga telah mengingatkan kedua menteri terkait, tentang kerugian nega-ra dalam proyek Hambalang. "Secara lisan tentu saya akan lakukan (mengingatkan) berda-sarkan laporan BPK," tegasnya.

Mencegah bantahan-ban-tahan para pihak terkait, Ang-gota Komisi III DPR Bambang Soesatyo, menilai urgensi au-dit forensik BPK. "DPR akan meminta BPK, kalau perlu au-dit forensik. Agar pihak-pihak yang patut diduga terlibat tidak bisa *ngeles* (menghindar) lagi dengan berlindung di balik kekuasaan Istana," tegasnya.

Politisi Golkar ini menilai tanggapan Seskab Dipo yang mengaku belum melihat ada-nya penyimpangan dalam la-poran BPK, identik saat meneri-ma laporan kasus *bill out* Bank Century Rp 6,7 triliun dari BPK.

"Itu kan sama sikap Istana saat menerima laporan audit kasus Bank Century Rp 6,7 triliun dari BPK dulu. *Ya* na-manya juga usaha. Biar saja. *Toh* Dipo dkk tinggal dua tahun di Istana. 2014 selesai. *Nah*, kelak setelah mereka bukan siapa-siapa lagi, mereka tidak akan bisa berkalah seperti yang me-reka lakukan saat ini," tegas Bambang.

Badan Akuntabilitas Ke-uangan Negara (BAKN) DPR sendiri kurang puas terhadap hasil audit BPK. Pasalnya, isi laporan tersebut hanya men-nyertakan dugaan-dugaan pe-nyelewangan proyek.

"Memang namanya *execu-tive summary*, *ya* menurut BAKN kurang. Semua pakai kata diduga-diduga. Ini masih duga-an atau memang sudah dipe-riksa? Misalnya, tidak usah pa-kai kata patut diduga," kata Ketua BAKN DPR, Sumarjati Arjoso.

Telaah BAKN Menurut Sumarjati, kata diduga seperti belum ada bukti.

Padahal, dalam pemeriksaan BPK itu sudah terdapat bukti dan fakta. "Kalau ada bukti, *kak* diduga terus *sih*. Tulis saja tidak sesuai," tandasnya.

Sumarjati mengungkap-kan, dokumen yang diberikan BPK berjumlah 92 halaman, belum termasuk cakram padat dan lampirannya. Kini LHP itu ditelaah tenaga ahli BAKN dan Sekjen DPR.

Ia memperkirakan 12 No-venber 2012 rampung, dan didokumentasikan. "Sebelum reses selesai kita sudah selesai. Reses selesai 18 November 2012, jadi kita sampaikan sekitar 15 November 2012. Jadi sebelum reses selesai, kita sam-paikan ke komisi X dan Pimp-inan DPR," janjinya.

Tugas BAKN, menelaah hasil pemeriksaan BPK terkait data dan fakta. Hasil telaah itu diserahkan ke Panitia Hamba-lang Komisi X. "Di Komisi itu dibahas tindaklanjut dan sebaga-nya," jelasnya.

Begitu nama Andi Malla-rangeng makin gableng dalam skandal proyek Hambalang, para petinggi Demokrat menilai akan membebani tugas SBY seba-gai presiden maupun berdam-pak tak baik bagi partai.

"Dengan nama Andi (ma-suk) sudah pasti jadi beban bagi presiden dan Partai Demokrat. Kami berharap Pak Andi bisa menjalani ini dengan baik. Dan, tentunya harapan kami Pak Andi bisa mengatasi dengan baik. Audit BPK perlu dipas-itkan dengan hasil pemeriksaan KPK," tegas Anggota Dewan Pembina PD, Hayono Isman.

Wakil Ketua DPP PD, Max Sopacua mengimani. "Beban bagi Demokrat itu sejak awal. Sejak nama Anas hingga Andi disebut, ini bukan hal baru. Tapi Demokrat punya prinsip ketika dinyatakan bersalah, peraturan partai akan diberikan seperti non-aktif atau apapun. Itu ber-proses," tegas Max.

Selang sehari setelah BPK menyerahkan LHP audit pro-yek Hambalang, KPK meng-geledah empat kantor dan ru-mah. Satu di antaranya, rumah Dirut PT Dutasari Citralaras (DC), Mahfud Suroso di Pon-dok Pinang, Jakarta Selatan.

"Memang ada pengele-dahan di sejumlah tempat ter-kait penyidikan kasus Hamba-lang, satu di antaranya rumah MS (Mahfud)," kata Jubir KPK Johan Budi.

Nama Mahfud masuk daftar yang diduga terlibat penyimp-angan proyek Hambalang. Di antaranya, menerima uang muka proyek sekitar Rp 63 miliar secara tak wajar. Selain rumah Mahfud, penyidik mengeledah kantor PT Me-thapora Solusi Global, Rukan Permata Senayan blok A dan rumah di Jl Gandaria 17 Jakarta. "Benar pengeledahan terkait kasus Hambalang," tegas Wa-kil Ketua KPK Bambang Wi-djojanto. (tribunnews/edw/aco/lau/few/dtc/mtv/okz)